

IMPLEMENTASI PROGRAM DESA MANDIRI CINTA PETANI (SARI TANI) DI KECAMATAN NOEMUTI, KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Agustinus Longa Tiza¹, Yakobus Kolne²
(aguslongatiza@gmail.com , graciakolne@gmail.com)

¹ Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor

² Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Abstrak

Program Desa Mandiri Cinta Petani (Sari Tani) yang diaplikasikan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) pada tahun 2012 merupakan suatu inovasi kebijakan dengan pendekatan pemberdayaan yang sasaran akhirnya mengurangi angka kemiskinan. Program Sari Tani memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif berdasarkan potensi unggulan yang dimiliki masyarakat sehingga program ini adalah program yang ideal sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Program Sari Tani di Kecamatan Noemuti adalah kurangnya sosialisasi program yang berdampak pada pemahaman masyarakat kurang memadai sehingga dana program lebih dimanfaatkan untuk kepentingan konsumtif, pola rekrutmen Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) kurang mempertimbangkan latar belakang pendidikan yang mengakibatkan rendahnya kinerja PKM. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis realitas implementasi Program Sari Tani. Data dan informasi yang dihimpun dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Sari Tani belum diimplementasi secara optimal. Mekanisme pelaksanaan program belum dilaksanakan secara baik, implementor program belum memahami perannya dalam pelaksanaan program, serta lemahnya pendampingan yang dilakukan PKM sehingga indikator capaian program kurang maksimal.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Kemiskinan, Program Sari Tani

PENDAHULUAN*

Kebijakan pembangunan dalam rangka menjawab tantangan terkait dengan penanggulangan kemiskinan merupakan upaya peningkatan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dan pemberdayaan masyarakat (people empowering) terutama di pedesaan oleh karena penduduk Indonesia sebagian besar bermukim di pedesaan dengan segala problematika seperti kemiskinan, keterbelakangan serta kerawanan sosial yang membelenggu masyarakat desa. Oleh karena itulah pendekatan pembangunan desa harus dilakukan secara hati-hati dan didasari oleh pemahaman yang baik atas masyarakat desa yang bersangkutan. Menurut Chambers (1996:5), bahwa memahami desa secara partisipatif mencerminkan adanya perkembangan pendekatan dan metode yang memungkinkan masyarakat desa saling berbagi, menambah, dan menganalisis pengetahuan tentang kondisi kehidupannya

dalam upaya membuat perencanaan dan tindakan.

Kebijakan publik merupakan arah, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kepada warga masyarakatnya. Arah dan tindakannya berupa undang-undang, program atau aturan. Prinsip kebijakan publik dinegara manapun selalu berorientasi pada pemecahan masalah riil yang dihadapi oleh warga negara atau masyarakatnya atau dengan kata lain kebijakan publik senantiasa berperan sebagai problem solver dan selalu mengabdikan kepada kepentingan publik. Berbagai kebijakan pemerintah terkait penanggulangan dan pengelolaan lahan kering kurang mendapat perhatian yang serius. Umumnya kebijakan-kebijakan pemerintah lebih berorientasi pada pengentasan kemiskinan dan tidak berbasis agroekosistem. Di Kabupaten TTU salah satu kebijakan pengentasan kemiskinan adalah melalui program Sari Tani.

Lebih jauh jika dicermati terkait dengan rata-rata tingkat pendapatan masyarakat yang masih rendah bahkan berada pada posisi ketiga terendah dalam skala Provinsi NTT. Jika angka pendapatan per kapita ini dikonversi ke dalam jumlah hari dalam setahun, maka rata-rata pendapatan penduduk TTU sebesar Rp.15.524,- per hari. Rendahnya

Nama : Agustinus Longa Tiza

Email : aguslongatiza@gmail.com

Alamat :Program Studi, Ilmu Pemerintahan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Timor – 856133.

penghasilan masyarakat ini sekaligus menggambarkan bahwa angka kemiskinan cukup tinggi. Pada tahun 2010, persentase penduduk dibawah garis kemiskinan mencapai 22,72%, dan pada kondisi 2014 menjadi 21,59 %. Angka ini masih lebih tinggi daripada persentase penduduk di bawah garis kemiskinan di Provinsi NTT yang mencapai 20,24% pada tahun yang sama.

Program Sari Tani mulai diaplikasikan pada tahun 2012. Secara spesifik, tujuan Program Sari Tani adalah untuk menurunkan angka kemiskinan masyarakat desa dan meningkatkan kesempatan berusaha masyarakat desa, terutama yang berpenghasilan rendah. Selain itu, program tersebut juga dilaksanakan untuk mengembangkan produk unggulan kabupaten (prukab) serta memperkuat kapasitas fiskal desa. Sasaran yang ingin dicapai dari Program Sari Tani adalah meningkatnya pendapatan masyarakat desa dari Rp 4.081.912 di tahun 2011 menjadi Rp 4.803.026 pada tahun 2015, dan menurunkan persentase keluarga miskin di pedesaan dari 65,62 persen di tahun 2011 menjadi 47,12 persen pada tahun 2015. Ironisnya angka kemiskinan masih tinggi, pendapatan keluarga rendah dan kurangnya lapangan kerja.

Peraturan Bupati (PERBUB) Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program SARI TANI, Bab I, Pasal 1, ayat 5 menyebutkan bahwa Program Desa Mandiri Cinta Petani yang selanjutnya disingkat SARI TANI merupakan program penjabaran dari RPJMD tahun 2011-2015 yang di kordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yakni peningkatan kapasitas fiskal desa serta upaya penanggulangan kemiskinan desa melalui pemberdayaan ekonomi rakyat desa dalam rangka mewujudkan kemandirian desa.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Salah satu target yang ingin dicapai dalam MDGs adalah menurunkan angka kemiskinan hingga setengahnya pada tahun 2015. Secara nasional telah dicanangkan bahwa target pencapaian persentase penduduk miskin pada tahun 2015 adalah 7,5%. Pencapaian pengentasan kemiskinan di Kabupaten TTU masih jauh dari target karena sebagaimana terlihat di atas, saat ini persentase penduduk miskin di Kabupaten

TTU masih cukup tinggi, mencapai 21,59% padatahun 2013. Angka ini terpaut jauh dari target nasional pada tahun 2015 yaitu sebesar 7,5%.

Secara nasional pada tahun 2015/2016 NTT menduduki peringkat ketiga provinsi termiskin setelah Papua dan Papua Barat. Jumlah penduduk miskin di NTT tahun 2016 mencapai 22,01% atau 1.150.080 orang dari sekitar 5,2 jta penduduk NTT (kupang.tribunews.com, 2017). Sedangkan untuk Kabupaten Timor Tengah Utara, jumlah penduduk miskin mencapai 44.871 jiwa atau 20,89% dari total 214.800 jumlah penduduk TTU. Sementara secara spesifik di Kecamatan Noemuti Kabupaten TTU menunjukkan masih banyak keluarga yang masuk dalam kategori miskin. Sesuai dengan data pada Badan Statistik Kabupaten TTU Tahun 2017 menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk di Wilayah Kecamatan Noemuti sebanyak 12.073 jiwa yang terdiri atas 3.641 KK dan penduduk miskin sebanyak 702 KK.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa masalah kemiskinan di Kecamatan Noemuti Kabupaten TTU masih tinggi. Untuk itu perlu adanya perhatian pemerintah Kabupaten TTU dalam mengatasi masalah kemiskinan melalui program Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pengelolaan lahan kering, yaitu program Sari Tani.

Implementasi Program Sari Tani di Kecamatan Noemuti belum berjalan secara efektif dikarenakan oleh banyak permasalahan seperti pemahaman masyarakat yang belum memadai tentang program yang berdampak pada tersendatnya pengembalian dana Sari Tani, Pelaksana Program Sari Tani kurang Profesional, indikator pencapaian program belum mencapai target, perilaku masyarakat yang apatis, malas dan hanya mencari peluang dalam mendapatkan bantuan saja, kurangnya SDM, kondisi sosial budaya dan tingkat pendidikan yang kurang memadai sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program, intensitas pendampingan dari para pendamping yang kurang optimal.

Kenyataan ini tampak bahwa dari data per Maret 2018 menunjukkan bahwa dana pinjaman sebesar Rp 1.120.835.240, yang tersebar di 28 kelompok dan 380 anggota kelompok masyarakat, total pengembaliannya baru sebesar Rp 503.744.170. Dengan demikian, masih ada tunggakan dana yang harus dikembalikan sebesar Rp 617.091.070. Untuk itu diperlukan koordinasi berjenjang baik dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Pemerintah Desa sampai pada pelaksanan

program dalam hal ini Kelompok Masyarakat pengelola dana bantuan secara aktif agar pelaksanaan Program Sari Tani di Kecamatan Noemuti mampu memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan aspek-aspek yang berhubungan Implementasi Program Desa Mandiri Cinta Petani (Sari Tani) di Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara yang dipotret melalui tiga sub fokus, yakni mekanisme pelaksanaan, implementor kebijakan, dan indikator pencapaian.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pertimbangan penggunaan metode kualitatif karena penelitian kualitatif mampu menyajikan bentuk yang menyeluruh (holistic) dalam menganalisis fenomena Implementasi Program Pembangunan Desa Mandiri "Sari Tani" di Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara. Selanjutnya data dan informasi yang telah dihimpun dianalisis dengan menggunakan model interaktif (*interactive model of analysis*) yang dikembangkan oleh Miles & Huberman yang terdiri atas tiga komponen analisis, yakni Reduksi Data, Penyajian Data (Display), dan Penarikan Kesimpulan (Verifikasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pelaksanaan

Implementasi kebijakan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan menggunakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan tertentu dan tujuan tersebut adalah mengisi, menyediakan dan melengkapi serta menghasilkan. Hal ini seperti dikatakan oleh Pressman dan Wildavsky dalam Tachjan (2006:15) yang mengemukakan bahwa, "*implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*".

Implementasi kebijakan program Desa Mandiri Cinta Petani (Sari Tani) menggunakan mekanisme atau alat untuk mencapai tujuan yaitu menggunakan norma kerja. Norma kerja adalah jumlah kegiatan tertentu yang dapat diukur dan telah dikerjakan Kelompok penerima sasaran dalam kurun waktu tertentu dengan pola Dana bergulir. Norma kerja menjadi acuan untuk menghitung total volume kerja yang telah dikerjakan pada periode tertentu dibandingkan dengan rencana.

Hasil penelitian tentang mekanisme pelaksanaan, khususnya tentang norma kerja, disimpulkan bahwa norma kerja yang

telah direncanakan oleh BPMPD tidak maksimal diimplementasikan dikarenakan terkendala beberapa hal di antaranya; kurangnya kesadaran dari penerima manfaat dana Sari Tani untuk mengembalikan dana tersebut yang akan digulirkan lagi.

Masalah macetnya pengguliran dana Sari Tani dari penerima manfaat dalam masalah implementasi kebijakan disebut *unsuccesfull implementation*. Tidak maksimalnya sebuah kebijakan dilaksanakan karena mengalami kegagalan pada saat proses implementasi. Implementasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada tetapi dalam prosesnya terjadi hambatan yang tidak dapat diduga (Abidin, 2012).

Berkaitan dengan masalah sikap masyarakat yang kurang mendukung proses kebijakan dalam implementasi kebijakan publik oleh Riant Nugraho dalam buku Public Policy mengemukakan masalah-masalah yang terdapat pada ketepatan proses. Ketepatan Proses terdiri atas 3 proses, yaitu: a) *Policy acceptance*; b) *Policy adoption*; c) *Strategic readiness* (Nugroho, 2012: 709). Dalam konteks ini, masyarakat kurang memahami kebijakan sebagai sebuah aturan main yang diperlukan untuk masa depan. Karena kurang memahami maka masyarakat kurang menerima kebijakan tersebut dan pada akhirnya tidak dilaksanakan dengan baik dan benar.

Implementor Kebijakan

Anderson dalam Tajchan mengemukakan bahwa, "*Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*". Artinya, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Nugroho (2012:709) mengutarakan hal yang sama bahwa pelaksana kebijakan senantiasa diawali dari aktor Negara atau pemerintah sebagai agensi eksekutif. Pemerintah sebagai pelaku utama disebut dengan kebijakan-kebijakan yang *government driven policy*. Smith dalam Quade (1977:261). menyebutnya dengan istilah "*implementing organization*", maksudnya birokrasi pemerintah yang mempunyai tanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan publik.

Hasil penelitian berkaitan dengan implementor kebijakan program Sari Tani ditemukan bahwa pelaksanaan Program Sari Tani terkendala pada implementor kebijakan yang mana mereka kurang mensosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat mengenai proses pengelolaan program tersebut. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa tujuan penting dari kebijakan tersebut dibuat pada umumnya dimaksudkan untuk "memelihara ketertiban umum (negara sebagai stabilisator); dan melancarkan perkembangan masyarakat dalam berbagai hal (negara sebagai stimulator) tidak terpenuhi karena implementor kebijakan, di mana mereka tidak mensosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat mengenai proses pengelolaan program tersebut sehingga banyak dana Sari Tani yang tidak digunakan karena masyarakat penerima manfaat takut untuk menggunakan dana tersebut.

Indikator Pencapaian

Mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Program Sari Tani, indikator pencapaian program "Sari Tani", adalah sebagai berikut;

1. Meningkatnya pendapatan masyarakat desa dari Rp. 4.081.912 di tahun 2011 menjadi Rp. 4.803.026 di tahun 2015.
2. Menurunkan prosentase keluarga miskin di pedesaan dari 65,62% keluarga di tahun 2011 menjadi 47,12% keluarga di tahun 2015.
3. Terciptanya 720 unit usaha produktif baru di kalangan masyarakat pedesaan pada tahun 2015
4. Terbentuknya 144 unit lembaga keuangan desa yang sehat di tahun 2015.
5. Terwujudnya 5 jenis produk unggulan kabupaten di tahun 2015.
6. Meningkatnya rata-rata Pendapatan Asli Desa (PADes) dari Rp.1.500.000 di tahun 2011 menjadi Rp.7.500.000 di tahun 2015. (Sumber: Juknis Sari Tani).

Hasil penelitian berkaitan dengan indikator pencapaian yaitu penerima manfaat tidak memahami tujuan pengelolaan dana Sari Tani secara baik, dan kelompok penerima sasaran belum maksimal menerapkan pengetahuan dan ketrampilan sesuai usaha tani yang dikembangkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Program Desa Mandiri Cinta Petani (Sari Tani) kurang mencapai tujuannya karena tidak tercapainya indikator pencapaian sebagaimana disebutkan oleh Van Meter dan Van Horn yaitu untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya

merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut:

Pertama, Program Sari Tani merupakan sebuah inovasi dengan pendekatan pemberdayaan dengan sasaran akhir mengurangi angka kemiskinan yang mendapat dukungan dari seluruh komponen terutama masyarakat Desa di Wilayah Kecamatan Noemuti oleh karena Program Sari Tani memberi keuntungan serta kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif berdasarkan potensi unggulan yang ada yang keseluruhan mekanisme pelaksanaannya berdasarkan pedoman Sari Tani, sehingga program ini bisa dikatakan sebagai program yang ideal sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, Dana Sari Tani diberikan kepada kelompok masyarakat yang berdomisili di di Wilayah Kecamatan Noemuti yang telah memenuhi syarat untuk mengelola dana tersebut. Namun, kelompok tani penerima manfaat dari Program "Sari tani" belum sepenuhnya memahami tujuan dan manfaat program. Kenyataan ini nampak bahwa dana yang diberikan tidak dimanfaatkan untuk usaha, mereka menganggap uang tersebut tidak perlu dikembalikan dan dimanfaatkan lebih banyak untuk kepentingan konsumtif.

Ketiga, Para Pelaksana/Implementor Program Sari Tani belum memahami betul tugas dan perannya masing-masing sehingga menyebabkan banyak tunggakan yang terjadi di seluruh kelompok penerima manfaat Program "Sari Tani"; Keempat, Pemahaman masyarakat terhadap keberadaan program Sari Tani juga tergolong kurang. Pengaruh tingkat pendidikan penerima manfaat program sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program "Sari Tani", masyarakat yang berpendidikan rendah enggan menerima suatu perubahan.

Beberapa saran sebagai rekomendasi perbaikan dalam pelaksanaan program di masa yang akan datang, sebagai berikut.

Pertama, Perlu adanya pengawasan yang lebih intensif untuk mengurangi resiko dijualnya bantuan hewan ternak atau bahkan pemerintah juga dapat memberlakukan sanksi kepada masyarakat yang menjual ternaknya untuk keperluan pribadi;

Kedua, Perlu dilakukan penyampaian informasi secara baik dan jelas mengenai tujuan dan sasaran kebijakan, agar timbul pemahaman dalam diri masyarakat bahwa bantuan yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka;

Ketiga, Perlu dilakukannya sistem seleksi ketat pada UPST dan PKM dengan persyaratan tertentu untuk suatu bidang pekerjaan dan melalui pendidikan/pelatihan tambahan setelah menjadi pelaksana;

Keempat, Perlu dilakukan penyampaian informasi secara sederhana, baik dan jelas mengenai pelaksanaan serta tujuan dari program sari tani kepada masyarakat yang tidak bersekolah atau yang berpendidikan rendah;

Kelima, Pendampingan yang intensif dari para pendamping Program "Sari Tani" lebih di optimalkan untuk keberhasilan pencapaian tujuan program.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Abidin Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik (Ed. 2)*. Jakarta: Salemba Humanika.
- [2]. Chambers, Robert. 1996. *Rural Development: Putting the last first*. Pepep Sudradjat (penerjemah). 1987. *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. LP3ES.
- [3]. Dunn, W.N. 1981. *Public Policy Analysis: An Introduction*. New Jersey: Prentice-Hall International, Inc., Englewood Cliffs.
- [4]. Mazmanian, Daniel H., & Paul A. Sabatier. 1986. *Implementatition and Pubic Policy*. New York: Harper Collins.
- [5]. Miles, Mathew B dan Huberman, Michael A. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. 2007. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia Press (UI-PRESS).
- [6]. Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo (Kompas Gramedia).
- [7]. Nograho, Iwan & Rochmin Dahuri. 2003. *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- [8]. Peraturan Bupati (Perbub) Timor Tengah Utara Nomor 18 Tahu 2013 tetang Pedoman Pelaksanaan Program Sari Tani.
- [9]. Quade, E. S. 1977. *Analisis for Public Decission*. New York: Elsevier Science Publishing.
- [10]. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016-2021.
- [11]. Sabatier, P.A. 1986. *Top-Down and Bottom-Up Aproaches to Implementation Research: A Critical Analysis and Suggested*

Synthesis. Journal of Public Policy, Vol.6. No. 1, Hal. 21-48.

- [12]. Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Jogjakarta: Gaya Media.
- [13]. Tachjan H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung PUSLIT KP2W LEMLIT UNPAD.
- [14]. Tahir, Arifin. 2011. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Pustaka Indonesia Press.
- [15]. Tjokroamidjojo, Bintoro. 1987. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.